



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI V DPR RI  
DENGAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI  
PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA  
(APERSI)**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : RDPU  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 22 Agustus 2022  
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom  
Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. (F-PPP) – Wakil  
Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : Membahas Industri Properti Bidang Perumahan dan  
Permukiman di Indonesia
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR  
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
35 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
8 dari 11 orang Anggota
    1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
    2. Mochamad Herviano
    3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
    4. Sukur H. Nababan, S.T.
    5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
    6. Sri Rahayu
    7. Ir. Effendi Sianipar
    8. Harvey B. Malaihollo
  2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
7 dari 8 orang Anggota
    1. Ir. Ridwan Bae
    2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
    3. Cen Sui Lan
    4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
    5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
    6. Ilham Pangestu

7. Muhammad Fauzi, S.E.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
4 dari 7 orang Anggota
  1. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
  2. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
  3. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
  4. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
3 dari 6 orang Anggota
  1. Drs. H. Tamanuri, M.M.
  2. Drs. H. Soehartono, M.Si.
  3. Sri Wahyuni
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)  
4 dari 6 orang Anggota
  1. H. Ruslan M. Daud
  2. Sofyan Ali, S.H.
  3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
  4. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
3 dari 5 orang Anggota
  1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
  2. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
  3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)  
1 dari 5 orang Anggota
  1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)  
3 dari 5 orang Anggota
  1. Athari Ghauthi Ardi
  2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
  3. H. Boyman Harun, S.H.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)  
2 dari 2 orang Anggota
  1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
  2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Ketua Umum DPP APERSI (Junaidi Abdillah)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL  
KETUA KOMISI V DPR RI:**

**Yang saya hormati Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang saya hormati Pengurus dan Anggota DPP APERSI,  
Serta hadirin yang saya muliakan,**

Mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat wal'afiat. Baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual dari tempat masing-masing Anggota Komisi V.

Karena ini tidak memerlukan kuorum, menurut tata tertib maka izinkanlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)**

Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada DPP APERSI yang telah berkesempatan untuk bertemu dengan Komisi V DPR RI pada hari ini. Dan, tentunya akan menyampaikan maksud dan tujuannya hadir di Komisi V, ini.

**Anggota Komisi V, serta DPP APERSI yang saya hormati,**

Komisi V DPR RI telah menerima surat dari DPP APERSI No.002/XHI/SEK/DPP-AP/2 Tahun 2022 Tanggal 7 Februari 2022 perihal permohonan audiensi mengenai industri properti bidang perumahan dan permukiman di Indonesia.

Terkait dengan itu, maka kami persilakan kepada Saudara Pimpinan DPP APERSI untuk memperkenalkan para anggotanya yang hadir pada hari ini. Dan juga untuk menjelaskan maksud dan tujuannya, sekaligus juga kami minta untuk dapat menyampaikan penjelasan terkait permasalahan yang akan disampaikan ke Komisi V DPR RI.

Sebelum memulai, saya mau tanya APERSI ini ada persi-persi ada *nggak*? Kayak Abdesi itu *Iho* persi ini persi ini, *nggak* ada ya? Silakan untuk melakukan perkenalan dan penyampaian maksud dan tujuan DPP APERSI. DPP APERSI ini Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh

Indonesia. Selanjutnya, kami persilakan kepada DPP APERSI untuk menyampaikan maksud dan tujuan, silakan.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
**Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua,**

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi V,  
Yang saya hormati Bapak Anggota Komisi V DPR RI,**

Sebelum saya memperkenalkan masing-masing yang hadir, saya memperkenalkan dahulu kaitannya dengan APERSI, Bapak. APERSI didirikan Tahun 1998 Pak, pada saat reformasi. Dan, saat ini anggotanya 3.500 pengembang perusahaan seluruh Indonesia dari 29 Provinsi yang terbentuk. Tahun ini, mohon maaf, Tahun 2021, APERSI telah merealisasikan 103.000 unit rumah untuk masyarakat MBR khususnya rumah bersubsidi, Pak, 103.000 unit rumah, terus 15.000.

**KETUA RAPAT:**

Bisa dipaparkan dia dulu *nggak*?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Belum masuk materi, Pak, oh iya.

**KETUA RAPAT:**

Tayang-tayang, *nggak* perlu tunggu selesai.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Ya, ketik aja.

**KETUA RAPAT:**

Iya, kita sepakati pertemuan hari ini sampai jam 12.

**(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Makasih, kami ulangi Bapak dari 3.500 anggota ini kita terkonsentrasi 90% adalah membangun rumah KPR bersubsidi, Pak, dari 103.000 unit rumah yang terealisasikan pada Tahun 2021. Dan, untuk rumah komersilnya kita sedikit Bapak, kurang lebih 15.000. Artinya fokus kita adalah untuk merumahkan rakyat kecil, Pak, yaitu masyarakat MBR.

Yang berikutnya, kami akan memaparkan beberapa hal terkait audiensi hari ini. Tapi, saya perkenalkan dahulu sebelah kanan saya Bapak Bambang, Wakil Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan. Bapak Solihin Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik, dan Pak Darsono Bidang Perbankan, Pak Taufan Bidang Rumah Susun, Pak. Dan, yang dibelakang ini perwakilan DPD, beberapa DPD yang kebetulan ada masalah yang akan kita sampaikan yaitu dari Jawa Tengah Pak Bayu, dari Kalimantan Timur Mas Teguh, Pak Irwan dari Sumatera Utara, Joko Arianto dari Kalimantan Barat, Bu Narti sama dari Kalimantan Timur, Petra dari DPP APERSI, Pak Salmon juga dari DPP APERSI di Wakil Ketua Bidang Legal, Pak Yuswendi dari Padang, Pak, Sumatera Barat, dan Pak Gun dari Jawa Barat, Jawa Barat ini realisasi terbesar Pak, untuk kami. Habis ya? Baik, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sekjennya *nggak* ada ya?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Iya Pak?

**KETUA RAPAT:**

Sekjennya *nggak* punya?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Sekjennya katanya kena macet ada demo di depan, Pak, jadi sudah dekat katanya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oh.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Iya baik, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Baik, jadi maksud kedatangan kami ke sini Pak di antaranya terkait bagaimana rumah KPR untuk masyarakat MBR ini tetap terjaga dengan baik. Sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan rumah itu masih mudah dalam hal persyaratan dan lain sebagainya. Jadi, kita mulai Reza.

Baik ini, Pak, ada kita bagaimana menginginkan percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat MBR. Ada hal permasalahan yang perlu kita minta bantuan dukungan dari DPR di antaranya dukungan Pemerintah terhadap kelayakan proyek. Permasalahannya akar penyebabnya jika penentuan batasan harga rumah lebih rendah dari biaya, ini perlu saya jelaskan nanti. Resiko fluktuatif kuota, kepastian (suara kurang jelas) kemampuan masyarakat, kenaikan biaya dan bunga, kenaikan biaya perizinan, kenaikan biaya PSO, proses bisnis pengembang yang belum efisien.

*Nah*, ini ada solusi dari pengamatan kita ya, Pak, ya. Jadi, sinkronisasi dalam penentuan kuota dan harga, meningkatkan dan menjaga konsistensi kuota KPR, Pak. Selama ini kita pernah ngalamin kuota KPR itu sangat kurang sehingga kita pernah beraudiensi dengan Presiden, akhirnya ditambah tapi belum maksimal, Pak. Itu pernah kita alami Tahun 2020. Menjaga harga rumah subsidi tetap sejalan dengan biaya pembangunan, ini saya ceritakan kenapa kita sampaikan, masa dua tahun ini, dua tahun setengah ini kami tidak mengalami penyesuaian harga rumah, Pak, padahal material bahan bangunan, harga tanah ini melonjak tinggi karena memang harga rumah ini kan disepakati oleh Pemerintah juga ada kenaikan setiap tahun.

Jadi, dua tahun setengah ini kami tidak mengalami kenaikan sehingga *supply* teman-teman sangat kurang dan dibuktikan realisasi KPR di tahun ini sangat rendah, Pak, dibanding tahun lalu pada semester yang sama. Ini diakibatkan teman-teman bisa menjual tapi akhirnya tidak bisa membangun, cuma untuk menjaga *cashflow* untuk mempertahankan tetap membangun secukupnya saja, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Kenaikan *nggak*? Semen berapa persen?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

*Eh*, ada.

**KETUA RAPAT:**

*Nggak* ada ya?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Kita tidak mencatat mencatat grafiknya, Pak, tapi fakta lapangan kurang lebih 20%, Pak, semen besi itu yang terutama, Pak. Kalau yang industri yang apa masyarakat sekitar kenaikannya *nggak* signifikan, Pak, yang kaitan berbau impor dan lain sebagainya, bahan bakunya.

**KETUA RAPAT:**

Ya, mestinya lengkap ini, Pak.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Iya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Jadi kita bisa ngitung.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Baik, nanti mohon maaf, Pak, kita susulkan, Pak, nanti itunya.

**KETUA RAPAT:**

Oh.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

*Nah*, selanjutnya kita berharap ada sesuai, ini Undang-Undang PKP Tahun 2001, Pak, kaitannya dengan perannya yaitu pemberian subsidi kredit konstruksi serta peningkatan nilai KLB KDB itu lahan, Pak. Selama ini kan kalau rumah subsidi sudah harga dibatasi tidak boleh kita sembarangan menjual. Tapi KLB dan KDB ini banyak daerah yang menentukan 70:30 kaitan porsi untuk luasan bangunan, jumlah bangunan dan luasan lahan.

Bantuan penyediaan lahan negara *nah* ini kita menginginkan sesuai Undang-Undang PKP kaitannya dengan penyediaan lahan oleh Pemerintah, BUMN dan lain sebagainya untuk dikerjasamakan.

Ini insentif perpajakan dan kemudahan perizinan, nah perpajakan ini memang penting Pak, apalagi masa dua tahun kita covid itu properti masih tumbuh positif, itu pun karena kerja Pemerintah memberikan insentif perpajakan sehingga untuk stimulus masyarakat membeli rumah lebih banyak. Permasalahannya di sini stimulus kita menginginkan tidak jangka pendek, Pak, karena antara membangun dan permintaan konsumen itu perlu waktu sehingga teman-teman ragu membangun ketika insentif pajak dihentikan, gitu Pak. Ini kita supaya masa-masa covid ini kita tetap bisa semangat hingga kondisi normal.

*Nah*, pemberian bantuan PSO juga kita harapkan kuotanya juga ditambah, Pak, kaitan anggaran. Karena memang PSO ini kecil sekali untuk partisipasi untuk rumah kaitan rumah subsidi.

*Nah*, ini apa yang dilakukan *developer* dalam menghadapi kondisi ini, di antaranya melakukan inovasi proses konstruksi. Tapi, tidak mengurangi nilai dan apa namanya kualitas untuk rumah layak huni. *Nah*, ini salah satunya (suara kurang jelas) antara lain menghilangkan berupa biaya proses. Jadi, jaringan-jaringan yang tidak perlu kita misalnya kalau barang kita *nggak* melalui

proses yang ke berapa tapi melalui langsung ke distributor atau langsung ke aplikasi jadi banyak yang dikurangi.

*Nah*, ini penyesuaian suku bunga berjenjang FLPP, Pak, untuk (suara kurang jelas) 4 kita perlu adanya solusi. Solusinya itu ada masyarakat yang penghasilan 4, 5, dan 5,99 hampir 6, itu lebih banyak di masyarakat kita di Indonesia paling banyak ini. Tapi, ada juga masyarakat yang sebenarnya posisinya juga butuh disubsidi, Pak, karena penghasilan juga 6 juta, 7 juta juga itu selisih sedikit tapi butuh rumah, tapi tidak ada subsidi jadi tidak ada kemampuan juga untuk membeli.

*Nah*, harapan kami usulan adanya desil 6-8 dengan pola kalau yang 6 juta tadi diberikan Pemerintah bunga 5% dan kita berharap yang penghasilan 6-8 juta menjadi 7% dan itu cukup 1-10 tahun sehingga tidak membebani negara, Pak, tapi memperluas permintaan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak, para Anggota sudah menerima bahannya belum? Tidak perlu dibaca ulang, Pak, garis besarnya saja.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Baik, Bapak oke, terima kasih, Bapak.

Jadi, permasalahan kita, yang kami sampaikan ke Bapak, sebenarnya di antaranya adalah insentif PPN, Pak. Supaya industri properti tetap jalan dan masyarakat masih bisa penyesuaian dalam kondisi saat ini. Dan, itu jangka panjang Pak, karena memang kalau jangka pendek keraguan teman-teman membangun waktunya habis sehingga KPR pun tidak bisa.

Insentif BPHTB, Pak, ini khususnya masyarakat yang MBR itu sangat kita sayangkan, sedih sekali, Pak. Sudah masyarakat cari makan susah, ngangsur itu keterbatasan, biaya KPR-nya itu tinggi, Pak, biaya KPR-nya di antaranya kita usulkan BPHTB untuk rumah subsidi khusus ya, Pak, ya rumah subsidi itu dikenakan 5%. Sehingga kalau harga 160 ya kurang lebih 5 sampai 6 Juta, total seluruhnya kurang lebih 13,5 Juta, Pak. Untuk masyarakat MBR ini sangat berat dan ini bisa wewenang dengan kewenangan Pemerintah, mudah-mudahan nanti bisa dibantu untuk meringankan, Pak, untuk masyarakat MBR.

Yang ketiga, ini kaitannya Badan Pengelolaan dana perumahan, Pak, kami rumah KPR bersubsidi itu menginginkan sama dengan KUR, Pak. Kalau KUR kan sama juga jenisnya subsidi, di KPR juga ada subsidi sama-sama 5%. *Nah*, cuma persyaratan untuk rumah KPR ini sangat banyak sekali, Pak, bahkan masyarakat itu kalau *nggak* salah mau KPR saja materai saja sampai 12 dengan banyaknya pernyataan-pernyataan. Ini kalau masyarakat yang kecil kan sangat memberatkan, Pak.



*Nah*, berikutnya kita menginginkan perizinan yang konsisten, Pak, standarisasi perizinan serta regulasi. *Nah*, ini di Indonesia, perizinan setiap daerah itu berbeda-beda penafsiran, Pak. Dan, kemarin kita sempat memakai Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya direlaksasi untuk diperpanjang kaitan perizinan masih diserahkan ke Pemda. *Nah*, Pemda sampai sekarang masih ada yang tidak bisa melaksanakan itu, Pak. *Nah*, ini yang kita harapkan kekuatan DPR yang membantu kami untuk menyelesaikan ini.

Berikutnya ini sangat sensitif, Pak, kaitan lahan sawah dilindungi. Pada prinsipnya kami sebagai pengembang juga turut partisipasi bagaimana ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga dengan adanya lahan sawah dilindungi. Cuma ini ada beberapa kendala, Pak, di mana untuk masyarakat dan pengembang itu banyak yang sekarang tidak bisa mengurus IMB, Pak. Dan, masyarakat juga tidak bisa balik nama sertifikat sebagai hak konstitusi untuk mendapatkan sertifikat. Karena LSD ini, Pak, lahan sawah dilindungi itu tidak sesuai dengan RT/RW di daerah.

Artinya dari BPN langsung ke daerah itu, kita *nggak* ngerti kerjasamanya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi seperti apa. Tapi faktanya *real* di lapangan banyak masyarakat yang sudah membeli rumah tidak bisa proses balik nama, Pak. Karena di situ dinyatakan lahan perumahan itu adalah lahan perumahan itu adalah lahan sawah dilindungi, padahal izinnya di awal sudah bisa jalan. *Nah*, jadi sebenarnya sederhana ketika pertek dari pertanahan itu keluar itu boleh dibangun, Pak. Tapi, ketika ketentuan LSD ini keluar, RT/RW ditimpa lagi, Pak. Jadi, ada aturan yang ditimpa, timbul tumpang tindih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

RT/RW Provinsi apa Kabupaten?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Kabupaten dan Provinsi, Pak, ada yang berbeda di situ. Gitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

*Nah*, terus kemudian ini, Pak, rumah subsidi ini kan harganya sudah dibatasi kaitannya dengan PLN, Pak. Ini teman-teman dipaksa untuk investasi terkait jaringan PLN, Pak. Baru dilaksanakan kurang lebih dua tahun ini, jadi kami diminta investasi rata-rata biayanya adalah 6 hingga 7 juta 1 unit rumah, Pak. *Nah*, ini kalau untuk rumah subsidi saya pikir tidak layak untuk kita terbebani seperti ini, Pak. Karena memang rumah ini kan untuk rakyat kecil kan gitu, jadi kendala kita juga kita dilibatkan untuk investasi.

Yang berikutnya harga jual rumah subsidi, permohonan kita agar Pemerintah untuk segera menyesuaikan harga itu, Pak. Karena memang sudah 2,5 tahun tidak ada penyesuaian, sementara harga material harga tanah itu kami sudah sangat tinggi. Dan, teman-teman sekarang membangun, menjual rumah tidak bisa membangun, atau bisa membangun hanya untuk menyelesaikan kewajiban. Yaitu mempertahankan kehidupan karyawan dan membayar bunga bank. Jadi, saya berkeyakinan program 1 juta rumah ini sedikit terhambat kaitan hal-hal tersebut di atas, Pak.

Ini yang saya sampaikan, untuk selanjutnya kami serahkan pada Pimpinan. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya, kami persilakan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V untuk merespon terhadap apa yang disampaikan oleh APERSI ini, silakan. Silakan, Pak Tamanuri.

#### **F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pak Ketua dan Pimpinan yang terhormat,  
Yang saya hormati kawan-kawan Anggota Dewan Komisi V,  
Yang saya banggakan Bapak-Bapak dari Asosiasi Pengembang  
Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, DPP APERSI,**

Kalau mendengar apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, keluhan-keluhan di mana dalam pembangunan perumahan ini yang jadi sasaran kita adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tapi, pada kenyataannya program kita ini justru tidak bisa memberikan bantuan yang layak kepada mereka-mereka itu. Kenapa? Karena pendapatan mereka memang sudah kecil, kemudian persyaratan sedemikian banyak sampai 12 persyaratan. Biasanya yang jadi sasaran ini kan orang-orang kecil yang pengetahuannya sedikit, kemudian pendidikannya juga rendah jadi sangat *menghalutkan* hal itu. Kemudian selain itu adalah dengan cicilan yang cukup tinggi.

*Nah*, jadi dari 3 hal ini sudah cukuplah itu memberikan satu kesimpulan bahwa kita tidak bisa membantu mereka ini secara maksimal. Sehingga apa yang menjadi sasaran kita, seyogyanya memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada rakyat yang misalkan membutuhkan ini. Tapi pada kenyataan tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

*Nah*, oleh karena itu saya akan menanyakan kepada Bapak, kira-kira solusi seperti apa yang bisa membawa program kita ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan, apakah perlu subsidi yang sedemikian rupa dari

Pemerintah atau jangka waktu pengembaliannya kita perpanjang, atau persyaratan-persyaratannya perlu kita lebih praktis lagi.

*Nah*, saya rasa yang saya tanyakan ini sangat-sangat perlu. Karena ada kemungkinan masyarakat itu, jadi waktu kami turun reses, waktu kami turun Kundupil, menanyakan hal-hal seperti ini, jadi setidaknya mereka punya suatu gambaran. Jangan sampai mereka buta sehingga selalu menyalahkan, baik asosiasi maupun Pemerintah. Terima kasih,

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya silakan, Bu Sri Rahayu.

#### **F – PDIP (SRI RAHAYU):**

Makasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan, Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Dan Bapak Ibu sekalian dari Pimpinan Pengurus Pusat maupun Daerah  
dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh  
Indonesia,**

Saya hanya ingin sedikit menanyakan terkait dengan yang pertama adalah soal asuransi, Pak. Premi asuransi ini saya mohon diberikan penjelasan, ini kan jadi naik ya semula 0,25 dan ini tolong ini asuransi yang seperti apa.

Kemudian yang kedua saya sampaikan saja langsung kepada Pimpinan, menurut saya KPR untuk 7% ya, Pak, ya, ini terlalu tinggi memang terlalu tinggi. Sehingga saya *ndak ngerti* secara teknis seperti apa, mungkin Komisi V bisa melayangkan surat gitu, karena ini untuk kepentingan masyarakat yang MBR yang berpenghasilan rendah menurut saya kredit dengan bunga 7% ini tinggi, Pak. kalau kita ambil 1 tahun apalagi ada yang 20 tahun, kalau 20 tahun itu sudah melampaui harga dari harga pokok ya dari rumahnya itu sendiri kalau 20 tahun, dan rata-rata 20 tahun yang sebagian besar.

*Nah*, oleh karena itu kalau kita hitung dari 7% 20 tahun itu sudah 140% itu luar biasa. Artinya membebani yang sebenarnya kita menginginkan membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tetapi, kalau dengan menggunakan kredit ini KPR ini justru akan membebani. Menurut saya ini direpson untuk bagaimana caranya supaya bank itu tidak mencari untung yang tinggi lah. Kalau KUR tadi betul yang disampaikan Bapak bahwa kalau KUR saja setahun itu hanya berapa persen? 6 ya? 5, 5% dan ini kalau judulnya saja kan KPR yang bersubsidi sebenarnya. Tetapi, kalau kenyataan seperti ini tentu akan yang beli nanti pada akhirnya juga orang-orang yang betul-betul mampu

dan mempunyai penghitungan yang menurut mereka bisa melakukan pembayaran. Dan, pada akhirnya juga kadang-kadang yang membeli itu orang-orang yang mampu. Oleh karena itu, ini perlu mendapatkan perhatian dari Komisi V, secara teknis apakah bersurat kepada siapa saya *nggak* ngerti ini untuk ini.

Kepada banknya atau kepada Menterinya yang punya program ini untuk melakukan permintaan bahwa kreditnya ini jangan terlalu tinggi lah. Kalau yang mampu-mampu, *nggak* usah yang *nggak* mampu lah, kita sendiri aja kalau misalnya menginginkan rumah yang bukan MBR ya, Pak, ya kalau misalnya mau kredit itu juga *ngitung-ngitung* kadang-kadang. Waduh ini bunganya sekian persen, 10 tahun menjadi sekian, itu juga menjadi hitung-hitung.

Kemudian, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa tolong Bapak-Bapak sekalian tadi kalau misalnya tanahnya memang menggunakan tanah yang *unproduktif*, ya, itu saya mendukung sekali. Tapi seringkali tanah-tanah yang subur-subur itu dimanfaatkan, tanah yang produktivitas dari pertanian itu dimanfaatkan. Mohon kepada Bapak-Ibu sekalian ini menjadi pertimbangan untuk tidak memanfaatkan tanah-tanah yang memang relatif produktivitasnya tinggi.

Karena kita negara Republik Indonesia ini harapannya kan mau swasembada pangan, kalau semakin, saya sedih Pak, kadang-kadang kalau misalnya di sebelah kanan kiri saya dulu itu sawah-sawah subur gitu bisa tiga kali panen dalam setahun sekarang tumbuhnya, tumbuh rumah semua itu sayang banget gitu. Maka itu menjadi pertimbangan dan mungkin untuk BPHTB ini juga perlu mendapatkan perhatian tetapi secara teknis ini kan BPHTB ini yang terima kan daerah ya, Pak, ya dari daerah masing-masing atau Kabupaten/Kota yang terima biasanya, ini juga perlu mendapatkan perhatian. Kalau memang bisa dilaksanakan mungkin bisa kita melakukan untuk khusus rumah-rumah yang MBR sehingga tujuan kita tercapai.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Soehartono. Ini ahlinya ini.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Makasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati teman-teman Asosiasi Pengembang yang saya hormati dan saya banggakan,**

Saya ingin menanyakan sesuatu yang terkait dengan operasional lapangan. Dari keluhan beberapa anggota pengembang di daerah saya. Yang semula antar PP itu menjadi rebutan itu, jadi belum jadi sudah dipesan gitu. Sekarang ini, animo masyarakat juga berkurang karena mungkin bunganya tinggi gitu ya.

Terus kemudian saya ingin tanyakan kepada Bapak, itu ya, tahun ini harga jual per unit itu 150 Juta per unit atau lebih, Pak? Masih 150?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Tergantung ini Pak, wilayah. Jadi ada zona 1, 2 sampai zona 5.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Oh gitu ya.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Baik.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Tapi untuk katakan wilayah 2 gitu berapa?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Wilayah 2, 168, Pak.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Oh 168.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Kalau di Sumatera 150.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Oh, begitu.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

52, Pak.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

168, kalau Jawa Timur?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Jawa Timur 152, Pak.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

152 oh.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Mohon maaf Pak, koreksi 150.500.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Saya orang Madiun, jadi saya tanya ke pengembang Madiun, *oh* 150 ya.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Iya.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Itu keluhannya memang sangat mepet, tadi saya dengar dari Bapak, ya. Keluhannya pengembang sekarang ini tidak serius untuk membangun sebanyak-banyaknya tapi sekedar membangun saja. Artinya itu kayak kalau tinju itu apa itu namanya? (suara kurang jelas) *Cover* bertahan, benar Pak ya? Bertahan saja, *ndak* nyerang sama sekali karena memang keuntungannya tidak besar.

Kemudian PPN itu sekarang ini sudah berapa? Sudah diberlakukan yang 11% atau masih 10%? Sudah 11%?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Untuk rumah komersil 11%, Pak.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Komersial?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Iya.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Tapi yang rumah yang.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Subsidi masih PPN 1%, Pak.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Oh iya.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Mohon maaf Pak PPH yang 1%, PPHTB 5%, itu yang berat, Pak. PPN nya 0, Pak.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Subsidinya dari Pemerintah masih 5 juta atau 5%?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Jadi, kalau bunganya 5%, Pak, selisihnya ditanggung Pemerintah.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Oh gitu iya iya. Oke, Pak itu saja yang penting.

Kemudian apapun yang menjadi pikiran dari Bapak-Bapak, ya, tuangkan saja. Nanti kami-kami ini mengusulkan kepada pejabat yang mempunyai wewenang. Saya kira demikian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Soehartono. Dari meja Pimpinan hanya itu yang mengajukan keinginan untuk merespon terhadap paparan dari APERSI dan,

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya silakan.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi V, teman-teman yang sama saya hormati, Ketua dan seluruh jajaran pendiri pusat dan daerah, APERSI ya,**

Pertama saya mengikuti tadi dari Zoom di jalan, Pak tapi putus-putus Pak. Mungkin ada yang ditanyakan teman tapi tidak terekam gitu ya. Langsung, mungkin begini tadi saya tangkap begini. Sekarang ada kesulitan gitu dengan kondisi sekarang katakanlah harga-harga yang naik untuk membangun rumah subsidi. Subsidi ini bisa berbagai tipe kan, tapi yang paling rendah katakanlah 21 ya? Sebenarnya nggak layak 21 itu 36 lah kita harusnya mengacu gitu ya 36 ke atas.

*Nah*, ini dikatakan tadi semen mungkin mulai naik ya, besi yang urusannya naiknya cukup ini ya, signifikan *gitulah*. Yang ingin saya tanyakan begini ya, saya juga pernah ikut ini ya kursus 2 hari *developer* Indonesia itu, 2 hari, jadi mengetahui bagaimana permasalahan itu, bagaimana membangun itu ya. Kalau waktu itu beberapa tahun yang lalu, ya, 5 tahun yang lalu ini untuk mendapatkan untung yang lumayanlah, tanah itu harusnya maksimal 200.000 gitu per meter gitu, kalau sudah lebih dari itu. *Nah*, ini kan adanya di zona-zona pinggir ya, kalau kita zona 1,2,3 mungkin zona 4 gitu ya.

*Nah*, pertanyaan saya begini, tadi marginnya hampir dikatakan hanya cukup untuk menggaji pegawai, mempertahankan hidup-lah perusahaannya begitu, apa iya begitu dan bagaimana kita menyikapi ini, gitu. Misalnya kalau yang bagus kan kalau kita tipe 36 tanahnya 100 Meter sehingga masih ada pengembangan. Tapi kalau tidak bisa karena menyangkut ini harus ada keuntungan juga dari 70 atau kurang dikit dan ini sempit sekali.

*Nah*, ini Pak Ketua kebetulan saya tadi menyangka masih Edi Ganevo teman saya itu, ya udah ganti ya?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Sudah.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Pimpinan, ada interaksi sedikit.

Jadi, ini yang kedepannya harus kita bantu APERSI ini karena menyangkut rumah subsidi kan yang notabene banyak sekali masyarakat pasti menginginkan rumah, orang berumah tangga pertama itu pengen rumah gitu. Yang bisa mereka beli atau dapatkan adalah rumah, yang pertama itu rumah, rumah subsidi itu, apalagi untuk ASN baru, TNI Polri, swasta juga.

*Nah*, ada permasalahan juga, Pak, yang selanjutnya, ini ada batasan ini disebutkan *nggak* tadi, si pembeli ini harus pendapatannya berapa gitu, Pak?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**



8 juta.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

8 juta?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Maksimal.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Maksimal, Minimalnya? maaf.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

4 Juta.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

4 juta? *Nah*, padahal ada yang pendapatannya di bawah 4 juta gitu, mampu sebetulnya, *nah* ini yang menjadi masalah. Jadi, terutama sektor informal itu agak masalah mendapatkan rumah MBR. *Nah*, ini yang harus kita diskusikan ke depan ya.

Saya dulu pernah kalau ASN, TNI, Polri waktu saya di daerah. *Nggak* usah dipikirkan, bisa mendapatkan gitu. Tapi bagaimana sektor informal? Artinya gini ASN, TNI, Polri itu mampu dengan pendapatan yang masuk kategori itu 4-8. Tapi kalau sektor informal *gimana*, tapi dia punya kemampuan apalagi harian, harian itu tak menentu, Pak. Tukang ojek bisa sampai 150 ribu sehari, bisa juga kurang 70 ribu gitu, saya sudah tanya, berapa pendapatan yang paling minimal? Ya di 50-70 ribu minimal itu, tapi kadang bisa 150. *Nah*, jadi *nggak* pasti gitu ya seperti ASN, TNI, Polri, Pegawai Swasta, BUMN dan lain sebagainya.

*Nah*, ini Pak yang jadi masalah kami, masalah kita semua coba supaya semua rakyat Indonesia mendapatkan rumah yang layak. Ya, ini juga aturan-aturan yang sangat mengikat yang menjadikan kesulitan bagi masyarakat mendapat rumah ini harus kita rubah. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Izin nama, Pak, namanya Bapak ?

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Saya?

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Iya, Pak.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Eddy Santana Putra Pak.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAI DI ABDILLAH):**

Baik, Pak, terima kasih.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

A-72 Keanggotaannya.

**KETUA RAPAT:**

Mantan Bupati, Pak.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Sudah selesai?

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya silakan, Pak Hamka.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Pak Santana, Eddy Santana. Mantan Walikota. Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Teman-teman semuanya yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini,**

Yang ingin saya, nama saya Hamka, Pak, ya Hamka BKD. Yang ingin saya dalam di sini terkait solusi, 6 solusi yang Bapak sarankan di dalam pemaparan Bapak tadi. Saya hanya fokus dulu kepada poin 4. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana Bapak bisa melayani untuk MBR yang pekerja informal. Pekerja informal itu sangat banyak di Republik Indonesia ini, di sisi lain tentu Bapak berhadapan dengan bank-bank yang notabene harus *bankable*, itu yang Bapak hadapi.

*Nah*, oleh karena itu saya ingin mau masuk intinya gimana teknis yang terbaik saran Bapak di dalam menangani persoalan ini? Apakah itu bank swasta, bank Pemerintah, semuanya menghendaki adanya *payroll*, buruh harian tidak punya rumah, tidak punya *payroll* tapi lumayan pendapatannya. Bagaimana mendapatkan rumah terhadap MBR yang informal tersebut, ini yang perlu pemikiran tersendiri. Kalau Pegawai Negeri jelas bisa didorong oleh Bank BTN atau BRI, yang informal ini yang susah.

Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan masukkan dari Bapak, apa yang harus kita lakukan terhadap MBR yang informal ini karena setahu saya itu banyak sekali macamnya program-program dari utamanya yang mendapat subsidi. Ada program sikumbanglah, si itu lah, sipitung yang tidak ada, macam-macam Pak, persyaratannya.

*Nah*, oleh karena itu saya ingin mendalami ini agar supaya ada konsep yang bijak yang harus kita lakukan, yang tidak merugikan pendana dari bank dan juga mendapat rumah bagi MBR yang informal tadi. Kalau yang *fix* ada *payroll*-nya saya kira penyesuaian tarif saja yang mungkin bisa diselesaikan, atau penyesuaian apa saja yang mungkin bisa diusulkan di sini.

Saya kira itu saja, karena saya mengikuti FLPP ini terus, apalagi sekarang sudah ada BPR bank yang di PUPR itu Tapera. Ini hubungannya Bapak-Bapak semua ini dengan Tapera terhadap pengalokasian subsidi yang diberikan. Mohon ada masukan kepada kami karena ini juga menjadi sorotan dari kami terhadap FLPP tersebut.

Saya kira untuk sementara itu, Pak Ketua, mudah-mudahan diskusi kita ini membawa hasil dan juga akan kita hadapkan nanti pada diskusi-diskusi dengan Kementerian PUPR khususnya di sektor perumahan. Demikian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Hamka. Pak Hamka ini adalah laki-laki yang ingin mendalami sedalam-dalamnya. Silakan, Pak Mulyadi.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Paling enak kalau dalam Pak, supaya ketahui semua.

**F – P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

Baik terima kasih, Pimpinan,

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi Ta'ala wabarakatuh,*

**Pimpinan dan rekan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Serta Bapak-Bapak dari pengurus DPP APERSI yang saya banggakan,**

Saya Mulyadi, Pak, Dapil saya kebetulan Kabupaten Bogor, Pak. Penguasa Puncak ya. Saya hanya menceritakan tentang pengalaman di lingkaran Dapil dan radius yang dekat dengan Dapil, Pak. Jadi kalau pendalaman-pendalaman dan mohon masukan juga kepada kami saya kira sudah cukup dari rekan-rekan. Tapi saya ingin membahas tentang sisi pasca pembangunannya, Pak. Kadang-kadang saya lihat banyak sekali rumah-rumah yang sudah dibangun ternyata kosong misalnya, rusak. *Nah*, itu juga kita mungkin ada hal apa yang bisa kita terima sebagai masukkan sehingga pasar *secondary*-nya itu atau kenapa begitu banyak bangunan yang kosong dan akhirnya rusak.

Jadi, ada kesan mengejar target jumlah perumahan yang harus dibangun, tapi pasca pembangunan kemudian tidak optimal bahkan tidak ada penghuninya dalam tanda petik. Itu satu Pak, jadi saya, kami minta masukan bagaimana menangani masalah-masalah seperti itu seperti kalau bahasa kita itu jangan mubazir, Pak. Satu sisi Bapak mengejar pertumbuhan jumlah untuk meng-*cover* kebutuhan, tapi sisi lain ada rumah-rumah yang sudah jadi banyak sekali, Pak. Saya kebetulan dekat dengan Cibarusah, Cikarang itu banyak, Pak itu di daerah-daerah yang ternyata gencar dibangun tapi kemudian banyak yang kosong dan rusak, ya itu kan sayang, Pak.

Sementara kan mungkin kalau masyarakat karena *cost of fund* sebagai *buyer* ya, Bapak yang bertanggungjawab untuk mengelola pembangunan dan seterusnya juga harus punya solusi bagaimana itu bisa teratasi.

Yang kedua, Pak, untuk pengadaan, saya idenya setuju tuh tentang pengadaan bank tanah misalnya. Saya kira juga perlu dibangun komunikasi Pak, dengan *stakeholder* di internal Pemerintah terutama banyak sekali ini, Pak mohon maaf ya. Saya di daerah saya dan di beberapa titik radius daerah dapil saya, banyak lahan-lahan yang *idle*, Pak, yang ternyata dikuasai oleh Bank Indonesia, karena eksekusi *debt to asset* gitu ya, itu kan aset-aset itu kan bisa dioptimalkan, Pak. Kalau Bapak membangun komunikasi dengan *stakeholder* terutama dari keuangan dari perbankan dan seterusnya, aset-aset itu ternyata menjadi jaminan tambahan atau bahkan Bapak bisa silaturahmi ke KPK sekalipun, Pak. Karena ada ratusan hektar mungkin daerah-daerah yang dekat

daerah-daerah komersial itu dikuasai oleh KPK, Pak. Mungkin itu bisa dikerjasamakan, kenapa? Untuk kepentingan rakyat, kan ujung ujungnya rakyat, Pak.

*Nah*, itu solusi-solusi itu saya kira perlu didalami Bapak-Ibu sekalian, supaya apa? Ada orientasi antara pelayanan dan komersial. Antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan kita, Pak. Saya kira itu saja Pimpinan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi Ta'ala wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Makasih, Pak Mulyadi. Tanah-tanah KPK banyak Pak katanya, tapi jangan setelah Bapak bangun Bapak masuk ke dalamnya. Silakan Pak Muhammad Aras secara virtual, mana Pak Aras?

**F – PPP (Drs. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**F – PPP (Drs. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):**

Oke terima kasih, Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Ketua Umum, Sekjen dan seluruh Anggota APERSI,**

Maaf, saya masih di Dapil sementara malam baru menuju ke Jakarta untuk mengikuti bersama teman-teman.

Yang pertama, tentu kami menerima baik masukan-masukan dari teman APERSI tentang kondisi terkini terkait dengan keberadaan pembangunan MBR di negeri ini. Yang kedua, saya di waktu yang sama dengan teman-teman, salam hormat saya kepada Ketua Umum, Sekjen dan teman-teman APERSI. Yang pasti bahwa kami ini selalu *men-support* memberikan dukungan terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan yang tentu ada di lingkaran teman-teman para pengembang.

Yang kedua, tentu kami memohon kepada teman-teman APERSI untuk lebih memberikan informasi asuntif kepada kami kepada kita semua supaya

apa yang menjadi kebutuhan yang harus diselesaikan tadi ada 6 solusi, betul-betul bisa dibantu difasilitasi oleh teman-teman Komisi V.

Yang kedua, kami juga berharap kepada Pemerintah betul-betul memberikan pelayanan yang maksimal terutama keluhan teman-teman itu terkait dengan bunga yang begitu tinggi. Kemudian persyaratan-persyaratan begitu rumit, praktis bahwa kegiatan teman-teman di daerah itu tadi keluhannya Pak Mulyadi ada yang rumah yang tidak ditinggali, rumah yang kualitas rendah. *Nah*, ini juga sangat terkait dengan pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh para pengembang. Oleh karenanya, mohon kepada Pemerintah lebih fokus pada bagaimana penyediaan lahan itu disiapkan oleh apa namanya, Pemerintah Daerah melalui RT/RW-nya. Karena praktis di kota-kota besar hari ini tidak ada lagi lahan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman MBR. Sehingga kondisinya harus minggir ke pinggir-pinggir kota bahkan ke daerah-daerah penyangga.

*Nah*, tadi sudah disinggung juga bahwa untuk bisa mendapatkan profit dari MBR ini kan hanya tanah yang harganya 200.000 ke bawah per meter. *Nah*, hampir pasti bahwa dalam kota sudah tidak ada lagi 200.000 per meter, hampir semuanya di luar daripada itu. Tetapi kami yakin dengan pasti bahwa komitmen Pemerintah untuk membangun rumah kepada rakyatnya, kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mudah-mudahan terus komitmen itu dijalankan sehingga ada kemudahan bagi kami bagi kita semua bisa menyediakan fasilitas itu.

Dan, berharap juga teman-teman pengembang terutama dari APERSI juga jangan sampai melupakan kualitas. Kalau hanya mengejar misalnya kuantitas, ya bisa jadi seperti yang disampaikan Pak Mulyadi tadi itu ada di mana-mana. Dan, ini juga kami temukan teman-teman juga banyak yang melakukan hal yang seperti itu.

Oleh karenanya, kita juga bisa memaksimalkan kualitas, tapi jangan pernah lupa juga, kuantitas juga harus tetap kita siapkan. Karena kebetulan masyarakat terhadap rumah ini masih sangat tinggi. Hanya saja memang persyaratan-persyaratan atau baik itu *user* maupun kepada pengembang itu sendiri. Oleh karenanya, berharap pada APERSI untuk memberikan solusi-solusi yang tentu akan kami bantu untuk bisa mempertemukan apa yang menjadi keinginan APERSI dengan keinginan-keinginan para *user* dan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah.

Barangkali begitu Pak Ketua, yang jelas kami siap selalu men-*support* mendukung langkah-langkah solutif yang akan kita sama-sama sampaikan kepada Pemerintah di rapat-rapat komisi yang akan datang, sekian.

*Wallahumuafiq Illaaqwamithoriq.*

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabaraktuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam*, (suara kurang jelas), karena. Iya silakan, Pak Ridwan.

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih, Pimpinan.

**Teman-teman Komisi V yang saya hormati,  
Dari DPP APERSI,**

Yang pertama, saya memberi apresiasi ya kepada pengurus APERSI ini. Semua sangat muda semuanya, tentu berpikiran panjang buat masa depan bangsa Indonesia terlebih buat masyarakat kita yang membutuhkan rumah. Tertangkap apa yang disampaikan oleh Ketua APERSI tadi sebenarnya adalah lebih bagaimana caranya memudahkan mereka, tidak melahirkan pembiayaan tinggi dan membebani mereka dalam hal membangun perumahan yang pada akhirnya masyarakat juga bisa ada kemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni.

Tadi, Pak Mulyadi saya sependapat ya untuk menjadi perhatiannya bahwa mungkin saja tentu kita akan menjadi perhatian bagaimana cara untuk memahami dan memperjuangkan menjadi kepentingan Saudara-Saudara semuanya. Kami sudah baca di sini di masukkan-masukkan ini ada di sini semuanya, bagaimana cara antara lain persoalan tingginya bunga bank dan seterusnya.

Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah Saudara-Saudara itu yang paling penting juga jangan lahir perumahan tapi justru perumahan itu juga melahirkan kekumuhan di kota itu sendiri, itu yang paling penting. Bahkan paling tidak adalah kekumuhan pada lingkungannya, itu harus menjadi perhatian dari Saudara-Saudara semua sebagai pelaku atau pengurus APERSI untuk menyampaikan kepada pengembangnya semua, agar mereka betul-betul memperhatikan. Sedikit mahal *ndak* masalah tapi bahwa ada keindahan dalam lingkungan itu sendiri.

Oleh karena itu, Pak Ketua, barangkali dengan masukan mereka ini adalah menjadi masukan buat kita yang pada akhirnya kita juga akan menyampaikan kepada unsur Pemerintahan terkait dengan bidang kita itu sendiri, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh.*

Demikianlah saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI. Dan, dengan demikian kami memberikan kesempatan kepada Saudara Ketua Umum APERSI untuk memberikan respon dalam waktu 10 menit. Silakan.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Baik, Pak, mohon izin penanya pertama tadi belum menyebutkan namanya Pak, jadi, nama Bapak tadi.

**F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):**

Tamanuri.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Baik, Pak. Baik, Pak Tamanuri, sebenarnya kalau saya perhatikan pertanyaan Bapak-Bapak Anggota sepertinya lebih banyak tahu juga Pak tentang perumahan. Jadi, pertanyaan dari Pak Tamanuri tadi sebenarnya persyaratan justru 29 lembar, Pak, pernyataan yang 12 lembar, Pak. *Nah*, pernyataan 12 lembar itu kalau materai untuk masalah MBR berat, Pak, satu hari saja kerja dapat 50 ribu-100 ribu.

*Nah*, terus solusi yang diharapkan ya termasuk jangka waktu tadi Pak, sebentar Pak, saya catatnya sebelah mana. *Nah*, solusinya kita berharap untuk pajaknya, Pak, biaya proses pajak untuk masyarakat MBR ini kita menginginkan BPHTB itu 0, Pak. Karena memang berat sekali semakin harga naik biayanya semakin mengikuti Pak, untuk BPHTB, itu kurang lebih 6 juta jadi total untuk biaya proses dan lain sebagainya kurang lebih 13,5 Juta, *nah*, ini sangat berat untuk masyarakat MBR.

*Nah*, yang berikutnya kita mohon untuk penyederhanaan persyaratan tadi Pak yang tadi 29, 12 materai, ya mungkin disederhanakan, satu pernyataan satu materai kan juga, sekian pernyataan satu materai kan saya pikir juga bisa, Pak, kan gitu.

*Nah*, juga kaitannya supaya harga juga seimbang dan tetap menjaga kualitas rumah, Pak. Itu perlu adanya stimulan, stimulannya itu kaitannya dengan fasilitas, Pak. Pertama mungkin yang sekarang yang kita lagi bermasalah ada listrik, Pak, itu investasinya 1 unit rumah kurang lebih 6 Juta Pak untuk beban pengembang, dulu gratis Pak, 2 tahun lalu, gratis sekali, hanya kita pasang kWh meter saja, jaringan tidak ada biaya dan sekarang wajib mengeluarkan investasi sebesar itu.

*Nah*, ini termasuk juga PSU, Pak, PSU kan anggarannya kecil sekali untuk di Kementerian PUPR dan itu dari sekian ratus ribu pengembang paling hanya 20% yang dapat. Artinya rasa keadilan juga, Pak, kenapa PSU kecil banget, mendingan dilarikan ke listrik Pak, yang mungkin semua pengembang dapat, mungkin semua masyarakat bisa dapat, kalau PSU ini pengembang tertentu, Pak. *Nah*, ini kan juga potensi juga jadi masalah juga kalau yang tertentu-tertentu ini, Pak.



*Nah*, terus pertanyaan dari Bu Rahayu kaitannya asuransi nanti Mas Bambang yang *nyampaiin* Bu, tapi yang lainnya saya jawab dulu. Jadi saya ralat Bu, jadi ada bunga kalau untuk rumah subsidi itu 5%.

**KETUA RAPAT:**

Pak ralat, Pak, nama beliau tidak hanya Rahayu, Sri Rahayu.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Ibu Sri Rahayu.

Jadi yang sekarang Bu, rumah KPR subsidi itu 5% Bu. *Nah*, maksud saya ada gaji yang ini kan kalau 5% itu gaji 4-6 Juta, Bu. *Nah*, masyarakat yang perlu disubsidi juga itu antara 6 juta hingga 8 Juta, *nah* supaya tidak membebani Pemerintah, kita mengusulkan masyarakat ini yang belum terakomodir bisa *nggak* diajukan 7% tapi dia bisa mendapatkan subsidi, Bu. Sehingga tidak juga membebani Pemerintah, karena kita menginginkan subsidinya itu 1-10 tahun saja. Karena kalau 10 tahun ke atas sudah perbaikan ekonomi, saya pikir selisihnya juga *nggak* seberapa Bu.

Setelah 10 tahun tujuannya apa? Supaya kuota ini tetap besar, Bu, jadi Pemerintah *nggak* harus nambah duit lagi, nambah duit tapi dengan 1-10 tahun itu akhirnya memperlebar jangkauan untuk mendapatkan apa teman-teman, yang belum dapat duit itu mendapatkan subsidi lagi, Bu, tapi tidak membebani Pemerintah. Jadi, tahunnya saja Bu, jadi 10 tahun ke atas kita pikir hampir semuanya sudah sejahtera dan rumah pun sudah bagus-bagus, kemampuan ekonomi rata-rata juga sudah membaik setelah 10 tahun.

*Nah*, kita juga menginginkan Bu, persyaratan itu, persyaratan itu, kenapa sih rumah subsidi banyak sekali, KUR itu yang juga subsidi kok sederhana sekali gitu, Bu. Apakah kita bisa seperti itu sehingga masyarakat MBR ini ngisi itu saja agak susah gitu Bu, ngisi *form-formnya* saja agak susah. Yang berikutnya.

**F – PDIP (SRI RAHAYU):**

Izin izin, Pak Ketua.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

*Nggeh*, Bu.

**F – PDIP (Dra. SRI RAHAYU):**

Maksud saya tadi bukan subsidi, Pak.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Oh kalau, subsidi.

**F – PDIP (SRI RAHAYU):**

Maksud saya bank ini bisa membedakan gitu maksudnya kalau yang ekonominya, apa berpenghasilan rendah ini bunga banknya itu jangan tinggi-tinggi *gituloh* maksud saya. Supaya mereka juga *nggak* awang-awangan beli, atau mungkin kalau di Jakarta mungkin minimal penghasilan 4 Juta, Pak. Tapi kalo daerah-daerah UMR, ya, itu hanya yang 2 juta ada yang segitu, *nah*, bagaimana supaya mereka-mereka yang rendah betul itu juga mendapatkan itu mendapatkan tempat.

Saya mohon maaf kenapa ini saya sampaikan, bahkan orang yang sudah hidup sekian tahun itu kalau di kota itu belum tentu punya rumah loh Pak, yang berpenghasilan segitu. Itu yang saya maksud untuk di banknya itu bagaimana caranya supaya Komisi V, saya *nggak* ngerti sekali lagi teknisnya apakah melalui Komisi V bersurat untuk membantu masyarakat. Ini kan salah satu program Pemerintah kan ini, makanya maksud saya masyarakatnya yang dibantu banknya itu *aja akeh-akeh gituloh* bahasa Jawanya itu gitu kalau *golek* untung gitu, makasih Pimpinan.

**KETUA UMUM DPP APERSI (JUNAIDI ABDILLAH):**

Sebenarnya kalau kita usul Bu, kan ada fungsi Tapera itu, Bu, tapi Tapera sampai saat ini belum maksimal. Sebenarnya kalau pengelolaan Tapera itu dengan baik, sampai sekarang saja kepesertaan masih PNS, Bu. Padahal masyarakat kita yang lain masih banyak yang termasuk pekerja, termasuk noninformal, yang informal itu sampai sekarang belum menjadi kepesertaan, Pak. Padahal ini kan potensi yang bisa memperkuat, apa, pembiayaan dan itu mungkin salah satu untuk mengurangi biaya bunga tadi Bu yang besar.

*Nah*, itu kalau Tapera sampai sekarang belum maksimal karena masih menjangkau PNS. Padahal di situ ada BUMD, BUMN ya kan sampai sekarang belum, pekerja, terus yang informal, peserta sukarela itu belum terakomodir. *Nah*, kalau ini Tapera bisa jalan saya yakin kekuatan untuk pembiayaan mungkin gak merepotkan Pemerintah sekarang ini, Bu. Jadi harapannya Tapera harus segera maksimalkan Bu, gitu, jadi harapan kami seperti itu.

**KETUA RAPAT:**

Sampaikan saja, Pak.

**(REKAMAN TERPUTUS)**

**ANGGOTA APERSI:**

Yang sudah punya rumah tapi tidak layak huni, itu plus minus kurang lebih sekitar 60 Juta. *Nah*, kami sebagai bagian dari warga bangsa ada

keterpanggilan berdasarkan UUD 45 Pasal 28 Poin (a) ayat (1) rumah tinggal itu adalah kewajiban tanggung jawab Pemerintah dan negara, Bu. *Nah*, kami coba ikut menjadi mitranya dalam rangka mengurai solusi tentang rumah tinggal ini. Dicanangkanlah kemudian Pemerintah membuat program 1 Juta unit rumah begitu, setahun, terealisasi plus minus 20% dari mulai pelaksanaan 2016. Jadi, masih banyak itu yang apa namanya, yang belum mendapatkan rumah.

Dalam pencanangan 1 Juta unit rumah, tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami bahwa antar Lembaga/Kementerian satu dengan yang lainnya, mohon maaf izin, belum terintegrasi begitu. Tidak sinkron bahkan tidak punya hubungan satu sama lain, bagaimana mensukseskan program Presiden ini 1 juta unit rumah. Satu contoh, perbankan dalam pencairan, kami tadi sudah sampaikan dan terenyuh untungnya dari mana, itu keterpanggilan UUD '45 kita sebagai warga bangsa.

Kalau perbankan mestinya cair sehari itu, setelah akad kami memenuhi semua persyaratan dan biaya, harusnya sehari atau besok bisa cair, ini ada yang cair 3 minggu, Pak, ada yang sebulan, kalau itupun tidak dikejar-kejar tidak cair, Pak, ini bank-nya bank Pemerintah gitu. Kalau boleh izin usul konkrit, ya perbankan, PUPR, Kementerian apa namanya ATR/BPN diundang dan biarkan di sini diskusi difasilitasi oleh Bapak-Bapak yang terhormat begitu, usul konkrit kami dari wadah apa namanya barisan rakyatlah begitu, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sudah lebih dari 2 menit, Pak.

**ANGGOTA APERSI:**

Kenapa Pak?

**KETUA RAPAT:**

Sudah lebih 2 menit.

**ANGGOTA APERSI:**

Siap siap.

**KETUA RAPAT:**

Jadi inilah.

**ANGGOTA APERSI:**

Masih boleh, Pak? Sedikit lagi.

**KETUA RAPAT:**

Sudah cukup, Pak, ini jam 1 kami terima tamu lagi, mestinya tadi satu suara saja jangan ada dua suara.

**ANGGOTA APERSI:**

Ya, tapi kalau boleh setengah menit saja, sedikit saja.

**KETUA RAPAT:**

Apa itu?

**ANGGOTA APERSI:**

*Nah*, kami ingin sampaikan begini, Pak, ini ada keluhan yang perlu ditanggapi semua, Pak. Jadi, kami sebagai pengusaha itu jangan sebagai objek hanya sebagai pelaku mendapatkan margin, tidak Pak. Sebelum kami mengelola itu tanah rumah subsidi kami justru sudah berkontribusi kepada Pemerintah dari pajak sebesar 7,5%, Pak, PPh 2,5% BPHTB 5%.

Kalau *round table* kami satu lokasi 10 Miliar itu sudah 750 Juta kami kontribusi satu pengusaha. Sementara ini tergabung kita ada 3.500 katakanlah yang aktif 3.000 pengusaha saja, Pak sudah 1,8 Triliun, belum jualan kami, Pak Bu, belum jualan. Apalagi dengan rentetan izin yang sedemikian rupa regulasinya.

Mohon maaf ini sebagai apa namanya, keluh kesah kami yang disampaikan kepada Bapak-Bapak sebagai wakil kami di DPR. Demikian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh*

**ANGGOTA APERSI:**

*Hatur nuhun, Pak.*

**KETUA RAPAT:**

Ya, jadi tujuan ke sini disampaikan belakangan. Baiklah.

**Bapak-Ibu sekalian,**

Demikianlah, rangkaian acara Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini. Meskipun tidak mengambil keputusan maka dapat kita akhiri. Nanti kami bahas dalam rapat internal, apakah kami akan mengundang bersama APERSI

dengan Dirjen Perumahan atau dengan OJK atau dengan Bank Indonesia, itu akan kami bicarakan dalam rapat internal.

Kami ucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran yang telah disampaikan DPP APERSI kepada Komisi V, *insyaAllah* akan kami bicarakan dan tindaklanjuti dengan pihak Pemerintah khususnya Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V. Apabila tidak ada hal-hal yang lain, kami perlu bicarakan lagi yang perlu kita bicarakan lagi. Pak Hamka tapi ada yang mau dibicarakan lagi? Cukup?

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Sedikit, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Saya menanggapi sedikit tadi.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Jadi, Bapak-Bapak semuanya, apa yang disampaikan baik tulisan maupun lisan, itu kami sudah memahami dengan baik. Tapi kita harus sadar juga bahwa keterbatasan-keterbatasan itu pasti ada, kita mencoba mensinkronkan. *Nah*, kalau kebutuhan perumahan seluruh Indonesia itu masih banyak, Pak, banyak sekali. Tadi disinggung Tapera, Tapera itu masih memerlukan *scheme*, bagaimana melayani MBR yang informal. Konsepnya adalah bagaimana informal itu punya tabungan di Tapera, itu yang dikonsepsikan, Pak.

*Nah*, oleh karena itu kita harus sadar juga, kita harus pahami juga bahwa mekanisme perbankan itu *bankable* sifatnya, karena juga tentu berpikir secara perputaran uang. Oleh karena itu, kita mencoba menyesuaikan keinginan-keinginan apa yang diusulkan, saya sampaikan saya senang dengan usulan strategis ini nanti kita rumuskan dengan baik. Semuanya, saya melihat tadi. PSU misalnya yang Bapak sampaikan ya, karena tertentu itu yang menarik untuk bisa kita pikirkan ya, menarik itu. Ada ya fasilitas umum, fasum ya, Pak, itu orang tertentu saja.

*Nah*, pertanyaannya kenapa tidak dilarikan saja misalnya kepada instalasi listrik, misalnya kan seperti begitu. Hal-hal begini bagus kita pikirkan ya, tetapi secara umum mungkin dalam kondisi-kondisi sekarang ini ya kita bisa

maklumi. Tetapi, kita harus punya konsep dasar yang memang harus kita pikirkan. Ini saya senang ada rumusan-rumusan, selama saya mengikuti RDP-RDP, kali ini saya melihat ada usulan rumusan, Pak. Ya, sehingga kita terarah pada rumusan makanya saya fokus tadi pada persoalan MBR yang sifatnya non-informal, ya itulah.

Tetapi yang katakan tadilah BRI saja, BTN saja, hanya itulah yang merupakan sebenarnya adalah bank yang *capable* di dalam menyelesaikan persoalan perumahan. *Nah*, di situ juga nanti kita kebijakan-kebijakan keuangannya Bank Indonesia dan seterusnya, inilah tujuan-tujuan prosentasenya, usulannya bagus.

Saya kira itu, Pimpinan.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Iya, izin.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Mudah-mudahan catatan ini menjadi bahan buat kita semuanya di dalam menyelesaikan persoalan perumahan secara keseluruhan.

Makasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Saya akan izinkan menambahkan, sekaligus diskusi ini mengusulkan. Tadi kan disampaikan harus ada kerja sama dengan Pemerintah Daerah. *Nah*, sebetulnya ada pengalaman kami sendiri sudah kami lakukan. Jadi, yang menanggung itu, Pak, BUMD. Kita buat kita bangun, *nah* ini yang perlu keaktifan dari masing-masing DPD, ya, DPP dan DPD lah pendekatan ke Bupati, Walikota, membuat perusahaan daerah. Dan, ini pernah kami lakukan, jadi semua subsidi. Jadi, yang didapat rumah itu bisa per hari 10.000 per hari itu, masih ada sekarang, hampir lunas *nggak* ada yang macet.

*Nah*, itu juga waktu itu dapat penghargaan dari Pak Farid, Menteri Perumahan pada waktu itu kan pisah Menteri Perumahan. Dan, dipamerkan di Rio de Janeiro waktu hari habitat sedunia, ada 200 rumah itu bisa, Pak. Artinya

kalau sekarang *nggak* mungkin lah 10.000, sudah jauh. Kalau saya hitung-hitung kalau 30.000 sehari itu didapat angka di atas 200 Juta, 20 tahun. Tapi yang nanggung, Bapak-Bapak kan *nggak* nanggung lagi, sudah beres gitu, bank yang bayar gitu kan, sama seperti sekarang.

Tetapi, BUMD itu terus melakukan itu, jadi sebagai kolektor dari yang mendapatkan rumah itu, kira-kira sama saja, sebulan dapat. Ketika saya tanya begini Pak, waktu itu ya, sektor informal saya kumpulkan. Kamu kalau saya buatkan rumah mampu *nggak* membayar 300 Ribu per bulan? Mana mampu Pak kami, *nggak* mampu kita, dapat sehari ya habis itu. *Nah*, kalau 10 Ribu sehari kamu mampu *nggak*? Wah, bisa Pak, bahkan 15 kami mampu waktu itu, 20 tahun yang lalu, kan sama saja Pak, 10 ribu.

Tapi, saya simpulkan mereka dapat berapa saja habis setelah beli beras, kebutuhan primernya sudah mulai beli lain-lain, Pak, beli rokoklah beli apa itu, saya bilang kamu berhenti merokok dapat rumah. *Nah*, ini-ini waktu itu dialog saya itu, sekarang masih ada Pak, rumahnya dan itu tidak, sayangnya tidak dilanjutkan, makasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima Kasih, Pak Eddy.

**Saudara Ketua APERSI,**

Ada orang merokok kemudian dia sakit paru-paru, datang ke dokter, berapa bungkus sehari? 3 bungkus, jadi berapa? 50 ribu, Pak. Coba kata dokter, Bapak tidak merokok, ditabung, Bapak bisa bikin rumah. Kata si pasien tadi, ini Pak dokter, klinik ini punya sendiri atau punya orang lain? Saya nyewa di sini bukan memiliki. Pak dokter, merokok? *Nggak*, ternyata yang bisa merokok bisa beli rumah, dokternya nyewa terus.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrobilalamin*, rapat hari ini dinyatakan ditutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)**

**JAKARTA, 22 Agustus 2022**  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**